

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bambang Suhada

Abstract

The economy of East Lampung Regency in the last five years is still dominated by agriculture, forestry, and fishery sector. The biggest economic sectors contributing to GRDP at current prices for 2014 are agriculture, forestry and fishery sector of 36.61 percent followed by mining and quarrying sector 30.01 percent (primary sector). While the services sector companies 0.08 percent or the lowest of the existing seventeen sectors. The agriculture, forestry, and fishery sectors which are the base sector, its role in encouraging economic growth in East Lampung is not considered as the prime mover sector. The dominance of agriculture, forestry, and fishery sector has not been able to boost the acceleration of growth of other sectors, especially the manufacturing sector, as the resulted commodities have not added value (value added) and have not optimally impacted the improvement of people's welfare.

There are three strategic issues that need to get serious attention in the context of local economic development of East Lampung Regency, namely: (i). The weak capacity of local communities to manage their potentials optimally, (ii). The relatively low institutional capacity and managerial organization as a prerequisite for optimizing the management of potential or economic resources and (iii). Not yet developed competitiveness of agricultural commodities (competitive advantage).

Some policies needed to encourage economic growth acceleration of East Lampung Regency, namely: (i). The need to revitalize the institutional partnership of integrated agribusiness (integrated partnership) by institutional consolidation at the farmer level to become an independent farmer group with legal status, (ii). Considering that agricultural commodities tend to be perishable, their production is seasonal and therefore requires rapid handling, it is necessary to create added value through agro-industrial processes to become marketable products, and (iii). One of the efforts to reduce or minimize the risk of farming is by introducing agricultural insurance program. Based on Law number 19 of 2013 on protection and empowerment of farmers, the Ministry of Agriculture has established a working group of agricultural insurance, especially in assisting rice farming (AUTP) and cattle (AUTS).

Keywords : *Local Economic Development, Value Added, Institutional Agribusiness*

PENDAHULUAN

Diberikannya kewenangan yang lebih besar oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui skema otonomi daerah menjadikan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) semakin memainkan peranannya yang besar dalam

membangun kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Semakin pentingnya kedudukan daerah dalam menentukan daya saingnya, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya perbaikan pelayanan publik dan pencapaian kinerja pembangunan daerahnya.

Penciptaan daya saing daerah (*Competitive advantage*) ekonomi lokal dapat dicapai melalui optimalisasi segenap potensi sumberdaya ekonomi (SDA, SDM, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial) dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan kemandirian ekonomi lokalnya. Untuk itu diperlukan kebijakan daerah yang mampu memberikan stimulan dan mendorong penggalan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk yang riil. Hanya dengan potensi ekonomi daerah yang riil, daerah akan mampu mengoptimalkan limpahan sumberdaya (*resources endowment*) sebagai basis menggerakkan roda pembangunan daerahnya (Suhada, 2016).

Menurut BPS Lampung Timur (2015), belum membaiknya perekonomian global serta melambatnya perekonomian nasional turut ambil dalam pelemahan ekonomi yang dialami Lampung Timur di 2014. Pertumbuhan ekonomi atas PDRB Migas mencapai titik terendahnya dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2014 ekonomi Lampung Timur hanya tumbuh sebesar 2,74 persen, jauh dibawah pertumbuhan 2013 yang mampu tumbuh sebesar 8,05 persen. Rendahnya geliat perekonomian global berimbas pada terpuruknya produksi minyak bumi Lampung Timur, di tahun tersebut nilai tambah yang dihasilkan kategori minyak bumi turun sebesar 3,34 persen.

Disisi lain perekonomian Lampung Timur yang tercermin dari PDRB tanpa migas juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Dimana perekonomian Lampung Timur tahun 2014 tumbuh sebesar 5,32 persen, lebih rendah enam belas basis poin dari pertumbuhan 2013. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan total perekonomian Lampung Timur, hampir keseluruhan kategori ekonomi turut mengalami perlambatan, kecuali beberapa kategori ekonomi. Kategori pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai salah satu kategori ekonomi utama mengalami pertumbuhan 4,16 persen di tahun 2014, lebih baik dari pertumbuhan 2013 yang tumbuh sebesar 3,79 persen. Kategori jasa perusahaan merupakan kategori ekonomi yang memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan kategori lainnya, kategori tersebut tumbuh sebesar 13,97 persen. Pada tahun 2014 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

sebesar 35,61 persen. Golongan tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 42,92 persen dari seluruh nilai tambah (*added value*) pertanian. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori ini terbesar adalah pada sub kategori perikanan yaitu sebesar 7,57 persen yang diikuti oleh golongan tanaman perkebunan sebesar 5,76 persen.

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun terakhir masih di dominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor perekonomian terbesar penyumbang PDRB atas dasar harga berlaku untuk tahun 2014 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,61 persen disusul sektor pertambangan dan penggalan 30,01 persen (sektor primer). Sedangkan sektor jasa perusahaan 0,08 persen atau terendah dari tujuh belas sektor yang ada. Persentase ini mencerminkan besarnya peranan masing-masing sektor/sub sektor dalam perekonomian Kabupaten Lampung Timur dan dapat digunakan pula untuk menunjukkan struktur perekonomian daerah tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Timur bersifat agraris.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor basis (*base sector*), peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung Timur dirasakan belum merupakan sektor penggerak utama (*prime mover*). Dengan kata lain, dominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tersebut belum mampu mendongkrak percepatan pertumbuhan sektor lainnya, terutama sektor industri pengolahan, sebagai akibat komoditas yang dihasilkan belum memiliki nilai tambah (*value added*) dan belum berdampak secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menggambarkan petani di Kabupaten Lampung Timur masih berorientasi pada upaya peningkatan produksi dan menjualnya dalam bentuk bahan mentah (*raw materials*).

Isu-Isu Strategik

Ada tiga isu strategik yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam konteks pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

Pertama, masih lemahnya kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola potensi-potensi

yang dimilikinya secara optimal. Kapasitas dimaksud pada gilirannya merupakan fungsi dari dan ditentukan oleh tingkat akses masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan langsung dengan pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat dan didorong oleh iklim usaha yang kondusif. Secara lebih spesifik akses dimaksud berkaitan dengan akses terhadap sumberdaya ekonomi seperti modal, lokasi usaha atau lahan, informasi pasar, teknologi serta sarana dan prasarana produksi lainnya. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, keterbatasan akses pada aspek-aspek perekonomian diatas telah membatasi peluang mereka untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Kedua, masih relatif rendahnya daya dukung kelembagaan (*institutional capacity*) dan organisasi manajerial sebagai prasyarat optimalisasi pengelolaan potensi atau sumberdaya perekonomian. Lemahnya daya dukung kelembagaan tersebut berimplikasi pada mudahnya nasib ekonomi masyarakat (khususnya petani) dipermainkan oleh fluktuasi pasar yang antara lain disebabkan oleh ulah para pelaku ekonomi yang kuat dan spekulan.

Ketiga, belum terbangunnya daya saing komoditas pertanian (*competitive advantage*) antara lain disebabkan oleh: masih terbatasnya teknologi budidaya, pembibitan dan pasca panen spesifik lokasi oleh petani, sehingga petani sangat tergantung benih impor (termasuk difusi dan adopsi teknologi pertanian), sifat komoditas pertanian yang relatif mudah rusak (*perishable*) yang menuntut penanganan cepat dan tepat, lemahnya struktur permodalan petani, harga pertanian yang sangat berfluktuasi, serta kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi.

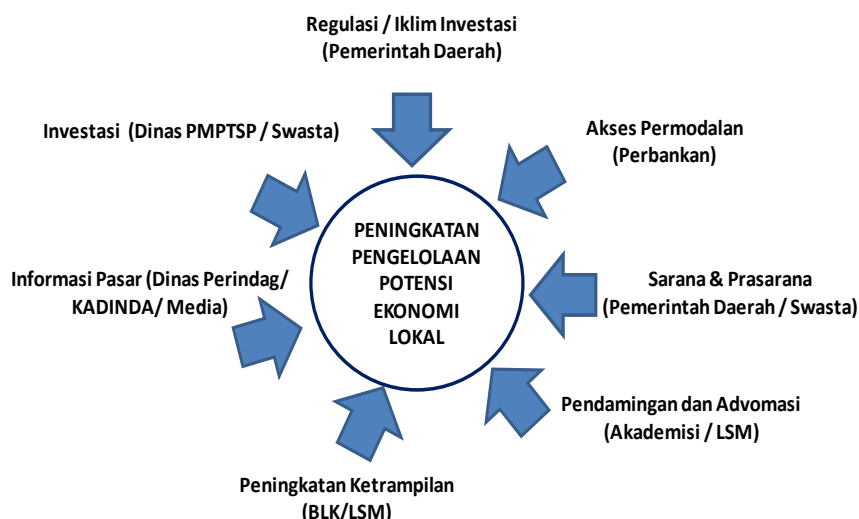
Perspektif Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan wilayah (*regional development*) harus menjadi suatu upaya menumbuhkan perekonomian lokal (*local economic development*), sehingga wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal (*local resources based*) Melalui pengembangan ekonomi lokal, pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, melalui pengembangan ekonomi lokal, pemerintah lokal dan

organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan (Suhada, 2016).

Secara metodologis, konstruksi ekonomi lokal memiliki argumentasi dan rasionalitas yang kuat untuk diimplementasikan. Berbagai negara yang sudah bangkit dari keterpurukan, pengembangan ekonomi lokal dalam prakteknya telah berhasil menumbuhkan kinerja perekonomian nasional. Keberhasilan tersebut merupakan pengalaman yang dapat dipelajari sebagai pedoman dan praktek terbaik (*best practices*). Menurut catatan Bank Dunia, di beberapa negara seperti : Italia, Vietnam, Brazilia, India dan sebagainya, telah mengadopsi pendekatan ekonomi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi nasionalnya. Konsep ekonomi lokal tidak serta merta diadopsi, tetapi tetap diperlukan berbagai penyesuaian (*adjustment*) yang didasarkan pada kompetensi inti (*core competence*), potensi sumber daya dimiliki (*resources endowment*), serta kondisi spesifik karakteristik daerah masing-masing.

Di banyak negara, konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) telah banyak diadopsi. Blakely (1994), mendefinisikan *Local Economic Development* (*natural resources, labor, capital, investment, entrepreneurs, transport, communication, industrial composition, technology, size, export market, international economic situation, local government capacity, national dan state government spending and development supports. All of these factors may be important. However, the economic development practitioner is never certain which factor has the greatest weight in any given situation*”. Lebih lanjut Blakely menyebutkan bahwa “..... *The central feature of locally based economic development is in the emphasis on endogenous development using the potensial of local human and physical resources to create new employment opportunities and to stimulate new, locally based economic activity*”.



Gambar 1. Sinkronisasi Sektoral Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
(Diadaptasi dari Solihin, 2008)

Menurut Munir (2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Sedemikian strategisnya konsepsi pengembangan ekonomi lokal (PEL) dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya lokal yang terbangun dengan basis kluster industri yang diharapkan mampu lebih mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah.

Dari sisi masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat

ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun asset pengalaman (Haeruman, 2001).

Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang spesifik lokasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi sumberdaya yang dimiliki. Oleh sebab itu dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi lokalnya, perlu diidentifikasi karakteristik ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk sistem interaksinya dengan daerah lain. Pada hakekatnya, perkembangan ekonomi suatu daerah tidak hanya didorong oleh kekuatan sumberdaya daerah setempat, tapi juga oleh dinamika interaksi dengan perkembangan ekonomi daerah lainnya. Dengan demikian strategi pembangunan ekonomi lokal tidak mesti dapat berlaku untuk daerah lainnya. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi lokal, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai konsepsi pengembang ekonomi lokal, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pengembangan ekonomi lokal.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi lokalnya dapat membuat masyarakat ikut serta menyusun konstruksi ekonomi lokal yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi lokal yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi lokal pada tahun depan (Darwanto, 2008).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan *location quotation* (LQ) terhadap sektor-sektor ekonomi Kabupaten Lampung Timur, diperoleh hasil sektor-sektor yang merupakan sektor basis adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (LQ 1,072), sektor pertambangan dan penggalian (LQ 4,953) dan sektor pengadaan listrik dan gas (LQ 1,369). Sementara, sektor-sektor ekonomi lainnya memiliki nilai LQ kurang dari 1 (sektor non basis). Kendati sektor

pertambangan dan penggalian memiliki nilai LQ tertinggi, namun meletakkan beban pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Lampung Timur pada sektor tersebut dalam jangka panjang kurang menguntungkan, mengingat komoditas tersebut merupakan *unrenewable resources* dan tidak mampu memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Lampung Timur hendaknya tetap menempatkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor penggerak utama (*prime mover*).

Meletakkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor utama dalam konteks pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Lampung Timur merupakan pilihan strategis. Namun demikian, sektor ini akan sulit berkembang jika Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan pemangku kepentingan yang ada kurang fokus dan tidak berupaya untuk mengaitkan gerak aktivitasnya dengan sektor-sektor lainnya (*inter linkages*) untuk menghasilkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi. Pengembangan sektor industri pengolahan, misalnya, dilakukan dengan menggunakan bahan mentah yang berasal dari sumberdaya setempat (*local resources based*).

Tabel 1. Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi Lampung Timur

Lapangan Usaha	Rataan LQ
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,072123284
Pertambangan dan Penggalian	4,953023861
Industri Pengolahan	0,357450913
Pengadaan Listrik dan Gas	1,369884094
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,473894381
Konstruksi	0,559238951
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Motor dan retail	0,640265593
Transportasi dan Pergudangan	0,356255785
Penyediaan Akomodasi dan Makan - minum	0,681316696
Informasi dan Komunikasi	0,850614414
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,590567613
Real Estate	0,680870953
Jasa Perusahaan,	0,470880893
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,800938167
Jasa Pendidikan	0,829517136
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,630897743
Jasa Lainnya	0,962686117

Sumber : Suhada (2016)

Langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Lampung Timur dengan fokus pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah menetapkan komoditas unggulan yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan data BPS Lampung Timur (2016), telah dilakukan kajian terkait dengan potensi komoditas unggulan yang ada. Ada delapan komoditas unggulan di Kabupaten

Lampung Timur, yaitu : Kakao, Ubi kayu, pariwisata, padi, jagung, karet, sawit dan perikanan. Dari hasil perhitungan penentuan prioritas komoditas dengan menggunakan pendekatan *weight product*, diperoleh skala prioritas untuk dikembangkan dalam bentuk klaster industri di Kabupaten Lampung Timur, yaitu komoditas ubi kayu, padi dan jagung.

Tabel 2. Ranking Komoditas Unggulan Kabupaten Lampung Timur

No	Jenis Komoditas	Vektor S	Vektor V	Ranking
1	Kakao	4,1588	0,1314	4
2	Ubi Kayu	4,6458	0,1468	1
3	Pariwisata	3,2671	0,1032	7
4	Padi	4,4851	0,1417	2
5	Jagung	4,3139	0,1363	3
6	Karet	3,8129	0,1205	5
7	Sawit	3,7738	0,1192	6
8	Perikanan	3,192	0,1009	8

Sumber : Suhada (2016)

Dari Tabel 1 diatas tampak bahwa komoditas ubi kayu masih menjadi andalan petani di Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehubungan lahan kering di daerah ini lebih luas dibandingkan lahan basah. Produksi ubi kayu /singkong di Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu sentra terbesar di Lampung dengan luas panen mencapai 53.740 hektare, produksi mencapai 1.433.094 ton, dengan produktivitas 241,47 kuintal atau 24,147 ton per hektare. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu lumbung padi di Propinsi Lampung, dengan luas panen pada Tahun 2014 sebesar 94.527 hektar dengan jumlah produksi 507.010 ton. Sementara untuk komoditas jagung, luas panen pada tahun 2014 sebesar 99.025 hektar, dengan jumlah produksi 516.412 ton (Bappeda, 2015).

Terkait dengan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Lampung Timur dengan fokus pada pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, beberapa kebijakan yang diperlukan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan revitalisasi kelembagaan kemitraan usaha agribisnis terpadu (*integrated partnership*)

dengan melakukan konsolidasi kelembagaan di tingkat petani hingga menjadi kelompok tani mandiri berbadan hukum. Kelompok tani mandiri yang sudah berbadan hukum mengkonsolidasikan diri dalam bentuk gapoktan atau asosiasi petani. Langkah berikutnya adalah melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha, tergantung jenis komoditas. Pilihan komoditas atau kelompok komoditas di sesuaikan dengan potensi wilayah dan permintaan pasarnya serta penerapan manajemen korporasi dalam menjalankan sistem usaha agribisnis.

2. Mengingat komoditas pertanian cenderung mudah busuk (*perishable*), produksinya musiman (*seasonal*) dan karenanya memerlukan penanganan cepat, maka perlu penciptaan nilai tambah (*added value*) melalui proses industri (*agro industrial*) untuk menjadi produk yang diminati pasar (*marketable*). Agar tercipta dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu menyusun skema pemberian insentif bagi pelaku industri pengolahan yang menggunakan bahan baku lokal agar tercipta keterkaitan

fungsional antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan khususnya, dan sektor-sektor pendukung lainnya (sektor transportasi dan pergudangan, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sebagainya).

3. Usaha di sektor pertanian dipandang sebagai usaha yang mempunyai risiko tinggi terhadap dinamika alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit, yang menyebabkan penurunan produksi hasil dan bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga sehingga pendapatan petani menurun. Salah satu upaya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko usaha tani adalah dengan mengintroduksi program asuransi pertanian. Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Kementerian Pertanian telah membentuk pokja asuransi pertanian terutama dalam membantu usaha tani padi (AUTP) dan ternak sapi (AUTS).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Lampung Timur (2015). *Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka*
- BPS Lampung Timur (2015). *PDRB Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Lapangan Usaha*.
- Blakely, Edward. J. (1994). *Planning Local Economic Development. Theory and Practice*. Second Edition. Sage Publications, Inc. 1994.
- Darwanto, H (2008). *Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bappenas
- Haeruman, Herman. Js. (2001). *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Lembaga Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat*". Sosialisasi Nasional Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Hotel Indonesia, 2001
- Munir, Risfan. (2007) *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Jakarta, Local Governance Support Program (LGSP)
- Saptana (2008). *Keunggulan Komparatif - Kompetitif dan Strategi Kemitraan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Suhada, Bambang (2016). *Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Industri di Propinsi Lampung (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan & Kabupaten Lampung Timur)*. Laporan Penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Metro.
- Solihin, Dadang (2008). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)*. Bappenas.